

Pencapaian Target Bantuan Internasional Periode 2005-2015: Pengaruh Citra Diri Nasional terhadap Kebijakan Bantuan Luar Negeri Denmark

Farras Ghaly

Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Target bantuan internasional sebesar 0,7 persen terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan target yang harus dicapai oleh negara-negara maju dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Target bantuan internasional tersebut dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1970. Sejak 2005, Uni Eropa (UE) memberikan penekanan untuk mencapai target bantuan internasional di tahun 2015 bagi negara-negara anggota UE. Namun faktanya, hanya ada lima negara anggota UE yang mencapai target bantuan internasional tersebut, termasuk Denmark. Sebagai negara UE yang memiliki tingkat PNB yang tidak tinggi, Denmark mampu mencapai dan menjaga konsistensi target bantuan internasional meskipun dalam kurun waktu sepuluh tahun dari 2005 hingga 2015 Denmark mengalami berbagai macam peristiwa yang dapat memengaruhi tingkat volume bantuan luar negeri. Penelitian ini kemudian mencoba untuk menjelaskan mengapa Denmark dapat bertindak demikian. Penelitian ini menggunakan pendekatan aspirasional konstruktivisme yang menekankan peran penting citra diri nasional dalam menentukan perilaku suatu negara. Citra diri nasional akan memberikan ide-ide, gagasan-gagasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu negara. Citra diri nasional tersebut dikonstruksi oleh elit-elit politik dan disesuaikan dengan sejarah yang dimiliki oleh Denmark. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan diulas mengenai citra diri nasional yang dimiliki oleh Denmark dengan argumen bahwa citra diri nasional Denmark merupakan faktor penentu dalam kebijakan bantuan luar negeri Denmark.

Kata-kata Kunci: *Denmark, Bantuan Luar Negeri, Target Bantuan Internasional, Citra Diri Nasional, Elit Politik*

0.7 percent of Gross National Income (GNI) for international aid target is a target that must be met by developed countries in the form of foreign aid. The international aid target was initially established by the United Nations in 1970 but since 2005, European Union (EU) has placed emphasis on meeting the international aid target of 0.7 percent by 2015. Despite the EU has urged all its members to meet the international aid target, there are only five EU member states that meet the target, including Denmark. With a lower level of GNI than other several EU member states and various events that could affect the volume of foreign aid within ten years from 2005 to 2015, Denmark is able to meet and maintain the consistency of international aid target she gave. This research then tries to explain why Denmark can behave so. This research uses an aspirational constructivism approach that emphasizes the important role of national self-image in determining the behavior of a country. The national self-image will provide ideas about what a country should do or shouldn't do. The national self-image, called The Danish Way, is constructed by Danish political elites and adapted to Danish history. Therefore, this research explores Denmark's national self-image with the argument that Denmark's national self-image is a decisive factor in Danish foreign aid policy.

Keywords: *Denmark, Foreign Assistance, International Aid Target, National Self-Image, Elite Politics*

Pada 24 Oktober 1970, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi dari pertemuan majelis umum dengan tema *International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade*. Terdapat beberapa isu yang diangkat di dalam resolusi tersebut, termasuk kewajiban negara-negara maju secara ekonomi untuk meningkatkan bantuan pembangunan resminya ke negara-negara berkembang dan akan melakukan upaya terbaiknya guna mencapai target sebesar 0,7 persen dari Produk Nasional Bruto (PNB) pada pertengahan Dekade (PBB, 1970). Melalui resolusi ini, untuk pertama kalinya masyarakat internasional memiliki target bersama dalam memberikan bantuan luar negeri. Sejak tahun 1970 hingga saat ini, target tersebut kerap diangkat oleh masyarakat internasional yang menandakan pentingnya isu tersebut. Khusus di kawasan Eropa, Uni Eropa (UE) sejak tahun 2005 juga telah menekankan pentingnya mencapai target bantuan internasional tersebut dalam pertemuan Council of The European Union di Brussels tanggal 23 dan 24 Mei tahun 2005. Pada siaran pers yang diberikan, ditekankan bahwa negara-negara anggota UE berkomitmen untuk mencapai target 0,7 persen dan menghimbau untuk mencapai target tersebut di tahun 2015 (Dewan Uni Eropa, 2005).

Melalui pertemuan ini, telah dirumuskan kebijakan pembangunan yang baru bagi UE dalam dokumen berjudul “European Consensus on Development” di tahun 2006 yang berisikan visi bersama dan kerangka kerja untuk kerja sama pembangunan bagi UE dan negara-negara anggotanya. Dalam dokumen tersebut pada paragraf 23 disebutkan bahwa UE telah mengadopsi sebuah *timetable* untuk negara-negara anggota guna mencapai 0,7 persen dari PNB di tahun 2015 (Dewan Uni Eropa, 2006). Meskipun demikian, berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2016, mengenai jumlah bantuan luar negeri dalam bentuk Official Development Assistance (ODA) yang diberikan oleh negara-negara maju, sebagian besar negara-negara anggota UE tidak dapat mencapai target bantuan internasional yang telah ditetapkan untuk dicapai di tahun 2015. Tercatat, hanya ada lima negara anggota UE yang mampu mencapai target bantuan internasional tersebut, yaitu Belanda sebesar 0,76 persen, Denmark sebesar 0,85 persen, Inggris sebesar 0,71 persen, Luksemburg sebesar 0,93 persen, dan Swedia sebesar 1,4 persen. Semua negara yang mencapai target bantuan PBB memiliki PNB kurang dari 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS), kecuali Inggris seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Tingkat Total PNB dan Persentase ODA Anggota DAC dari UE Tahun 2015

Peringkat	Negara	PNB (Juta Dollar AS)	ODA terhadap PNB
1	Jerman	3.739.792	0,52%
2	Inggris	2.826.573	0,71%
3	Perancis	2.708.478	0,37%
4	Italia	1.995.027	0,21%
5	Spanyol	1.324.465	0,13%
6	Belanda	827.559	0,76%
7	Swedia	567.531	1,4%
8	Polandia	506.769	0,1%
9	Belgia	499.449	0,42%
10	Austria	408.229	0,32%
11	Denmark	332.327	0,85%
12	Finlandia	255.188	0,56%

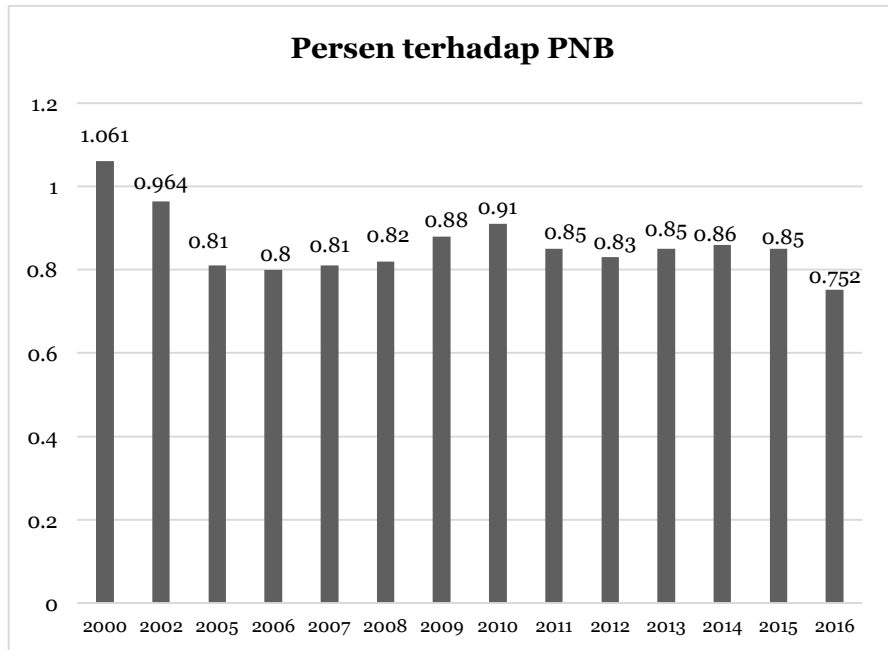
13	Irlandia	244.024	0,36%
14	Yunani	219.898	0,14%
15	Portugal	212.490	0,16%
16	Republik Ceko	191.359	0,12%
17	Slovakia	95.305	0,1%
18	Slovenia	45.794	0,15%
19	Luksemburg	43.868	0,93%

(Sumber: Bank Dunia & OECD, 2016)

Jika ditilik dari tabel 1 di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas negara-negara yang mampu mencapai target bantuan internasional sebesar 0,7 persen dari PNB bukan berasal dari kelompok negara dengan tingkat pendapatan yang besar. Negara seperti Jerman, Perancis, Italia hingga Spanyol tidak mencapai target bantuan internasional tersebut. Hal ini kemudian menarik untuk dikaji lebih jauh. Jika mengacu pada tabel 1 di atas, bahkan terdapat dua negara yang memiliki tingkat pendapatan di bawah lima miliar dollar AS seperti Luksemburg dan Denmark. Denmark kemudian dianggap krusial untuk dijadikan fokus penelitian mengingat selama periode 2005 hingga 2015, terdapat beberapa hambatan yang seharusnya mampu menurunkan tingkat bantuan Denmark.

Denmark sempat mengalami penurunan tingkat pendapatan nasional hingga mencapai enam persen akibat dari terjadinya krisis finansial global di tahun 2008 (IMF, 2014). Penurunan tersebut juga diikuti dengan tingkat pertumbuhan pasca krisis yang lambat. Rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan Denmark dari tahun 2010 hingga 2015 hanya berada pada tingkat 1,62 persen. Hal ini tentu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan Luksemburg sebesar 3,45 persen maupun dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan negara Skandinavia lainnya seperti Swedia yang mencapai angka 2,68 persen (Bank Dunia, 2015). Selain itu, selama periode 2005-2015 Denmark mengalami peningkatan hutang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan hutang negara terhadap PDB dari tahun 2007 yang semula berada pada angka 27,8 persen terhadap PDB meningkat menjadi 42,9 persen terhadap PDB di tahun 2010 (Trading Economics, 2016). Meskipun demikian, ternyata peningkatan hutang negara tersebut juga diiringi dengan meningkatnya tingkat volume bantuan luar negeri Denmark dari 0,81 persen terhadap PDB di tahun 2007, menjadi 0,91 persen terhadap PDB di tahun 2010 (OECD, 2016). Lebih lanjut, periode 2005-2015 juga terjadi peristiwa krusial dalam perpolitikan domestik Denmark. Sejak tahun 1975, partai Venstre yang selalu menjadi partai oposisi dari partai dominan yaitu partai Sosial Demokrat, untuk pertama kalinya memimpin pemerintahan Denmark melanjutkan dari tahun 2001. Perubahan tersebut tentu juga memengaruhi tingkat volume bantuan luar negeri Denmark mengingat partai Sosial Demokrat merupakan partai inisiator dari tingginya tingkat volume bantuan luar negeri yang diberikan oleh Denmark. Pemimpin Partai Venstre, Lars Løkke Rasmussen, di tahun 2013 bahkan mengusulkan untuk memotong anggaran bantuan luar negeri yang diberikan oleh Denmark. L.L. Rasmussen beralasan bahwa “in the middle of a recession and declining competitiveness, we don’t think it is the time overly generous targets” (Copenhagen Post, 2013). Meskipun demikian, selama periode 2005-2015, walaupun volume bantuan luar negeri Denmark lebih rendah dibandingkan pada dekade sebelumnya, pemerintah Denmark secara konsisten menjaga angka tersebut di atas target bantuan internasional sebesar 0,7 persen seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1 Persentase Tingkat Volume Bantuan Luar Negeri Denmark



(Sumber: OECD, 2016)

Dari grafik 1 di atas maka dapat dipahami bahwa tingkat volume bantuan luar negeri Denmark mengalami penurunan sejak dipimpin oleh partai Venstre di tahun 2001, meskipun penurunan tersebut tidak melebihi angka di bawah 0,7 persen. Jika ditilik dari grafik di atas, maka dapat dimengerti bahwa Denmark sejak tahun 2005 menjaga tingkat volume bantuan luar negeri berada pada atau melebihi angka 0,8 persen hingga di tahun 2015. Denmark kemudian di tahun 2016 menurunkan volume bantuannya di angka 0,752 persen. Hal ini kemudian menarik untuk dikaji lebih jauh mengapa Denmark berperilaku demikian.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan yang menjadi sentral dalam penelitian ini, yaitu mengapa Denmark mencapai target bantuan internasional 0,7 persen terhadap PNB pada periode 2005 hingga 2015 meskipun selama kurun waktu sepuluh tahun tersebut terdapat hambatan-hambatan yang dapat menghalangi upaya pencapaian tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori mengenai motif pemberian bantuan luar negeri. Secara umum, menurut Maurizi Carbone (2007, 41) terdapat empat buah pandangan dalam melihat motif pemberian bantuan luar negeri: (1) pandangan dari kaum realis yang menyebutkan bahwa bantuan luar negeri diberikan oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik; (2) pandangan dari kaum idealis, menyebutkan bahwa bantuan luar negeri digerakkan oleh motivasi-motivasi non-material. Motif non-material tidak diartikan sebagai motif yang berdasar pada keinginan meraih keuntungan material seperti ekonomi dan politik, melainkan sebagai motif yang berdasar pada gagasan-gagasan seperti altruisme, kewajiban moral, kemanusiaan hingga identitas; (3) pandangan dari kaum institusionalis yang menyebutkan bahwa organisasi internasional memiliki peran penting dalam pengembangan internasional sehingga kualitas dan kuantitas bantuan luar negeri ditentukan oleh organisasi internasional; (4) dari kaum liberalis, menyebutkan bahwa kondisi domestik seperti tekanan dari kelompok penekan, partai politik, birokrasi hingga *Non-Governmental Organization* (NGO) mengambil peran penting dalam menentukan bantuan luar negeri.

Penulis kemudian memfokuskan penelitian ini pada pandangan kedua, yaitu negara memberikan bantuan luar negeri atas dasar adanya motivasi non-material mengingat gagasan mewakili seperangkat nilai, prinsip, dan sikap khas yang memberikan beberapa arahan bagi pengambilan kebijakan (Wicaksana 2009, 6). Meskipun penulis menyadari dan tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui tiga asumsi lainnya. Guna mempertajam hal tersebut, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori mengenai citra diri nasional sebagai sebuah motif non-material. Citra diri nasional merupakan stereotip ideal dari suatu bangsa yang secara kultural dibagi bersama dan diabadikan (Neack 2008, 86). Menurut Anne L. Clunan (2009, 29), citra diri nasional dapat diartikan sebagai seperangkat ide-ide preskripsi atau ketentuan mengenai *what a country should do* dan *shouldn't do* yang dinarasikan atau dibentuk oleh elit politik yang disesuaikan dengan pengalaman bersejarah negara. Citra diri yang dapat bertahan lama akan cenderung dari waktu ke waktu mendapatkan posisi yang lebih kuat di benak para elit politik, yang kemudian membuat citra diri tersebut memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan para elit politik. Bila suatu citra diri dapat bertahan secara konsisten, semua indikator mengarah ke arah yang sama dan menciptakan keyakinan kuat tentang bagaimana memahami sesuatu dan bagaimana suatu negara bertindak. Keyakinan semacam itu cenderung menghasilkan panduan yang jelas bagi pembuat kebijakan (Elgstrom 2000, 156).

Lebih lanjut, citra diri nasional berisikan dua pilar yang berperan krusial dalam memengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Pilar pertama merupakan *political purpose*, mencakup keyakinan tentang sistem pemerintahan politik dan ekonomi yang tepat untuk negara dan apakah sistem ini juga sesuai secara universal. Selain itu, *political purpose* juga mencakup gagasan tentang nilai, prinsip, sifat, dan simbol apa yang menjadi ciri negara dan nilai dan prinsip apa yang harus mengatur hubungan antar negara (Clunan 2009, 31). Beberapa indikator yang digunakan adalah sistem politik-ekonomi dan misi nasional. Indikator sistem politik-ekonomi dimaknai sebagai sistem politik-ekonomi seperti apa yang menjadi preferensi suatu citra diri nasional. Sementara indikator misi nasional diartikan sebagai peran seperti apa yang dimainkan negara di dalam wilayahnya sendiri (Clunan 2009, 299). Pilar selanjutnya adalah *international status* yang mencakup persoalan mengenai kedudukan, penentuan posisi negara dalam hirarki kekuatan politik, militer, sosial, dan ekonomi di ranah internasional. Pilar ini melibatkan gagasan tentang posisi, rasa hormat, keseganan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara. Beberapa indikator yang digunakan adalah kedudukan internasional, peran internasional dan sifat dari hubungan internasional. Kedudukan internasional diartikan sebagai posisi yang ditempati atau harus ditempati oleh suatu negara dalam hirarki imajiner dalam sistem internasional serta dalam kelompok regional dan global. Peran internasional dapat dilihat dari pandangan elit tentang misi, peran, hak, dan kewajiban negara mereka pada ranah internasional. Sementara itu, sifat dari hubungan internasional mengacu pada gagasan elit dan kaidah masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antar negara (Clunan 2009, 231).

Dalam menentukan *international status* suatu negara, elit politik akan mengacu pada atribut nasional yang dimiliki oleh negara tersebut yang mencakup kekuatan militer, kemampuan ekonomi, sistem pemerintahan, ukuran hingga lokasi geografi (Kegley & Blanton 2011, 216). Atribut nasional tersebut akan menjadi indikator dalam melakukan *self-categorizing* negara untuk mengelompokkan dirinya ke dalam kategori tertentu. Kategori tersebut yang kemudian menjadi batasan-batasan bagi negara dalam bertindak. Suatu negara yang tergabung dalam kelompok yang memiliki citra diri nasional positif, negara tersebut cenderung akan mempertahankan hal tersebut dibandingkan dengan citra diri nasional yang bersifat negatif. Oleh karenanya, negara kemudian akan bertindak sesuai dengan citra diri nasional tersebut.

Hipotesis yang kemudian dapat diajukan adalah di tengah tidak tercapainya target bantuan internasional oleh sebagian besar negara-negara UE, Denmark mampu mencapai dan mempertahankan capaian target bantuan internasional selama periode 2005-2015. Tercapainya target bantuan internasional disebabkan oleh adanya citra diri nasional Denmark yang diartikulasikan elit politik sebagai acuan Denmark dalam bertindak. Citra diri nasional tersebut berisikan kedudukan internasional Denmark sebagai sebuah negara kecil yang membawa peran internasional untuk secara aktif menjadi negara dermawan dalam memberikan bantuan luar negeri guna tetap memainkan peran penting di ranah internasional.

Tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama berisi gambaran singkat mengenai target bantuan internasional yang ditetapkan oleh PBB dan ditekankan kembali oleh UE di tahun 2005 dan tahun 2015 ditetapkan sebagai tahun tercapainya target bantuan tersebut. Hanya ada lima negara yang mencapai target tersebut, diantaranya adalah Denmark yang kemudian menjadi sentral permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Bagian pertama juga berisi kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam analisis ini. Bagian kedua tulisan ini berisikan mengenai kekhasan bantuan luar negeri Denmark selama periode 2005-2015. Bagian ketiga tulisan berisikan bagaimana elit politik Denmark, dalam hal ini Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kerja Sama Pembangunan, menarasikan citra diri nasional Denmark. Bagian ini juga berisikan analisis bagaimana kekhasan bantuan luar negeri Denmark dapat dipengaruhi oleh citra diri nasional yang dimiliki Denmark yang kemudian berujung pada dijaganya konsistensi volume bantuan internasional di atas target bantuan internasional. Di bagian akhir, tulisan ini mencoba memberikan simpulan mengenai permasalahan yang telah diangkat.

Kekhasan Bantuan Luar Negeri Denmark Periode 2005-2015

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, segala aktivitas kerjasama pembangunan, dalam hal ini bantuan luar negeri, disebut sebagai DANIDA. DANIDA berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri yang dikoordinasikan oleh Menteri Kerjasama Pembangunan dengan berlandaskan hukum Undang-Undang Kerjasama Pembangunan tahun 1971. DANIDA bukan sebuah organisasi melainkan sebuah *brand* untuk segala aktivitas kerjasama pembangunan yang dilakukan pemerintah Denmark untuk memerangi kemiskinan dan mendorong hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdamaian serta stabilitas (Pemerintah Denmark, 1971). Jika mundur ke beberapa dekade, bantuan luar negeri sudah menjadi budaya masyarakat Denmark yang sejahtera dan menjunjung tinggi nilai solidaritas. Pemerintah Denmark sejak awal tahun 1960an telah menginisiasi kampanye nasional untuk memberikan bantuan kepada negara-negara miskin yang dananya berasal dari kombinasi dana pribadi masyarakat Denmark dan dana publik. Bahkan di tahun 1962, masyarakat Denmark telah menunjukkan antusias yang tinggi dalam mengikuti transmisi langsung sebuah pertunjukan mengenai pengumpulan dana yang akan diberikan kepada negara-negara miskin. Kota-kota dan desa-desa di seluruh Denmark bersaing untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk disumbangkan kepada negara yang membutuhkan (Kementerian Luar Negeri Denmark, t.t.). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan kepada negara-negara miskin telah menjadi budaya yang mengakar bagi masyarakat Denmark.

DANIDA sendiri dalam pelaksanaannya memiliki strategi dan prioritas yang dimuat dalam dokumen pemerintah setiap tahunnya. Dokumen tersebut berisikan strategi dan prioritas DANIDA untuk lima tahun kedepan. Meskipun setiap tahun Kementerian Luar Negeri mengajukan strategi dan prioritas untuk melaksanakan DANIDA, namun pada dasarnya

pendekatan yang digunakan tetap sama, yaitu pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) atau *human rights-based approach* (Kementerian Luar Negeri 2012, 8). Dengan menggunakan pendekatan ini, maka hal ini akan membuat HAM menjadi cara dan tujuan dalam kerja sama pembangunan atau bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Denmark. Sebagai sebuah cara, Denmark akan menerapkan empat prinsip fundamental, yaitu prinsip-prinsip non-diskriminasi, partisipasi, transparansi serta akuntabilitas dalam setiap fase bentuk kerjasama pembangunan. Sebagai sebuah tujuan, Denmark akan berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai HAM dalam setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, sipil hingga politik pada negara yang dituju (Kementerian Luar Negeri Denmark 2012, 8).

Dengan menggunakan prinsip non-diskriminasi, Denmark akan secara aktif menjamin kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Selain itu Denmark juga secara aktif menjamin hak-hak kelompok minoritas seperti anak-anak, masyarakat pribumi, orang tua, pengungsi, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, kaum agama minoritas, orang-orang yang mengalami diskriminasi kasta, orang-orang cacat maupun yang terkena dampak HIV/AIDS (Kementerian Luar Negeri Denmark 2012, 11); Melalui penerapan prinsip partisipasi, Denmark akan mendukung hak kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dimiliki masyarakat dengan cara menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi dan menciptakan inklusi di masyarakat yang dituju. Denmark akan berkontribusi dalam memperkuat adanya inklusi warga negara dalam pengambilan keputusan publik maupun keputusan administrasi, dengan fokus khusus pada kebutuhan untuk melibatkan kelompok-kelompok yang kerap diabaikan (Kementerian Luar Negeri Denmark 2012, 11); Prinsip lainnya yang diterapkan oleh Denmark adalah transparansi. Dalam memberikan bantuan luar negeri, Denmark akan menjamin bahwa seluruh masyarakat akan memiliki akses secara bebas terhadap informasi-informasi independen sehingga kekuasaan pemerintah yang tengah berkuasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya; Selain itu, prinsip akuntabilitas tidak luput menjadi prinsip fundamental dalam pendekatan berbasis HAM yang dimiliki oleh Denmark. Pada prinsip ini, Denmark akan membantu negara tujuan untuk memperkuat kapasitas negara dalam menjamin legislasi, sasaran dan rencana nasional yang memenuhi hak-hak asasi manusia sehingga layanan-layanan publik yang berkualitas tinggi dapat diakses oleh seluruh masyarakat (Kementerian Luar Negeri Denmark 2012, 11). Pendekatan berbasis HAM kemudian tercermin dalam prioritas-prioritas dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan atau bantuan luar negeri yang diberikan oleh Denmark setiap tahunnya.

Selama periode 2005-2015, prioritas bantuan luar negeri Denmark difokuskan pada upaya terciptanya hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Sebagai contoh, prioritas bantuan luar negeri Denmark di tahun 2009, yang dicantumkan dalam dokumen pemerintah tahun 2008 berjudul "Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance: Overview of the Development Assistance Budget 2009-2013", difokuskan pada penguatan bantuan di daerah Afrika khususnya bagi kaum muda Afrika. Meningkatkan kesetaraan gender serta hak dan kesempatan bagi perempuan, hingga menciptakan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan dan perdamaian melalui lokasi anggaran khusus yang diperuntukkan bagi demokrasi dan hak asasi manusia bernilai DKK 170 juta per tahun. Lebih lanjut, kawasan Afrika menjadi penerima bantuan prioritas bagi Denmark dalam periode 2005-2015. Meskipun ruang lingkup kebijakan pembangunan Denmark bersifat global, usaha konkrit Denmark difokuskan pada negara-negara paling miskin, di mana kebutuhannya paling besar, di mana Denmark dapat membuat perbedaan. Hal ini berarti bahwa fokus utama kerja sama pembangunan Denmark adalah dan akan terus berlanjut di Afrika karena Afrika merupakan wilayah dengan kebutuhan terbesar (Kementerian Luar Negeri Denmark, t.t.).

Selain itu, pemerintah Denmark juga menaruh perhatian khusus pada konsistensi volume bantuan luar negeri Denmark di atas target bantuan internasional sebesar 0,7 persen. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1 di bagian pertama tulisan ini, dapat dipahami bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, Denmark secara konsisten menjaga angka volume bantuan internasional di atas target bantuan internasional di angka 0,8 persen. Hal ini tentu sejalan dengan prioritas bantuan luar negeri Denmark di tahun 2006 yang dicantumkan dalam dokumen pemerintah berjudul “Commitment to Development: Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance 2007-2011” yang menyebutkan bahwa Denmark akan tetap menjaga angka volume bantuan luar negeri di atas 0,8 persen untuk tahun-tahun mendatang. Dokumen ini diterbitkan menyusul ditetapkannya target bantuan internasional di tahun sebelumnya oleh UE. Volume bantuan luar negeri dianggap menjadi bagian krusial bagi Denmark mengingat hal tersebut telah dituliskan di dalam dokumen pemerintah. Selain di tahun 2006, upaya untuk menjaga volume bantuan luar negeri di atas target bantuan internasional juga disebutkan dalam dokumen landasan pemerintahan tahun 2011 yang berjudul “A Denmark that Stands Together”. Disebutkan bahwa guna meningkatkan kontribusi dalam penghapusan kemiskinan global, Denmark akan membentuk sebuah jaringan 0,7 persen untuk memastikan tercapainya target bantuan internasional yang dilakukan oleh setiap negara. Selain itu, Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen (2015), dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menegaskan bahwa Denmark akan tetap berkomitmen terhadap target bantuan internasional PBB sebesar 0,7 persen karena Denmark telah dikenal secara luas sebagai negara pendonor unggulan dan oleh karenanya Denmark akan terus memberikan prioritas pada area ini. Hal ini kembali menunjukkan bahwa pencapaian target bantuan internasional merupakan hal yang krusial bagi pemerintah Denmark.

Narasi Citra Diri Nasional oleh Elit Politik serta Pengaruhnya terhadap Bantuan Luar Negeri Denmark

Citra diri nasional berisikan keyakinan dan gagasan mengenai sistem pemerintahan dan misi negara yang sesuai dengan negara tersebut, serta gagasan mengenai status internasional negara, seperti kedudukan, hak, dan kewajiban negara di ranah internasional. Gagasan semacam itu memerlukan pertimbangan historis tentang pengalaman domestik dan internasional sebelumnya (Clunan 2009, 10). Citra diri nasional yang dikonstruksikan oleh elit politik harus sesuai dengan pengalaman sejarah yang pernah dialami oleh suatu negara guna memiliki legitimasi dan berhasil mendominasi diskursus publik dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, pada bagian ini akan digambarkan citra diri nasional Denmark melalui kacamata historis dan bagaimana elit politik Denmark menarasikan citra diri nasional yang dimiliki oleh Denmark. Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai citra diri Denmark sebagai negara kecil, negara kesejahteraan, serta tanggung jawab Denmark di ranah internasional.

Secara historis, Denmark memandang dirinya sebagai sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara besar. Negara kecil diartikan sebagai negara yang memiliki ukuran atau wilayah yang kecil, jumlah penduduk yang sedikit, dan tingkat PDB yang rendah (Goetschel 1998, 15). Fakta menyebutkan bahwa secara geografis Denmark (tanpa Greenland dan Kepulauan Faroe) memiliki wilayah seluas 44.000 kilometer persegi saja. Denmark dikelilingi oleh Jerman dengan luas wilayah 357.000 kilometer persegi, Swedia dengan 450.000 kilometer persegi serta Norwegia seluas 385.000 kilometer persegi. Denmark juga memiliki jumlah penduduk yang sedikit dengan hanya berjumlah 5,5 juta jiwa. Hal ini diperkuat oleh sejarawan Denmark yaitu Uffe Østergård (dalam Gertsen et al 2012, 38) yang menyatakan bahwa Denmark memiliki masa lalu, bahkan hingga saat ini, sebagai negara kecil yang relatif homogen, “the quintessential

'small state' of international politics." Sebagai sebuah negara kecil, Denmark memiliki sejarah kelam ketika terjadi perang antara Denmark dengan Jerman pada tahun 1864 yang mengakibatkan Denmark kehilangan wilayah Southern Jutland dan kehilangan sepertiga wilayah, populasi, dan produksi yang dimiliki. Peristiwa ini menjadi trauma nasional bagi masyarakat Denmark (Østergård dalam Sørensen 2015, 6). Denmark merupakan negara kecil yang memiliki kerentanan sehingga perlu ada penguatan secara internal di dalam diri Denmark maupun penguatan peran internasional untuk menjaga kelangsungan kehidupannya (Korsgaard 2006, 149).

Pada pidatonya tahun 2005 dalam pertemuan NATO, Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen, mengakui negaranya sebagai sebuah negara kecil. A.F. Rasmussen (2005) menyatakan bahwa "2000 soldiers may not sound much, but Denmark is a small country with a population of only 5 million." Dalam pidato tersebut dapat dipahami bahwa A.F. Rasmussen menyadari bahwa Denmark merupakan negara kecil dengan indikator jumlah penduduk yang sedikit. Hal ini kembali diutarakan oleh A.F. Rasmussen di kesempatan yang berbeda di Indian Institute of Management, Bangalore, India tahun 2008. Pada acara tersebut A.F. Rasmussen (2008) menyebut Denmark sebagai sebuah negara kecil di Eropa Utara. Referensi yang digunakan oleh A.F. Rasmussen ketika menyebut Denmark sebagai negara kecil berdasarkan pada luas wilayah dan ukuran populasi yang kecil. Selain pada masa pemerintahan Perdana Menteri A.F. Rasmussen, Perdana Menteri L.L. Rasmussen juga menyatakan hal yang serupa. Misalnya pada pidato di hadapan parlemen Denmark tahun 2009, L.L. Rasmussen menyatakan "this tiny green spot on the planet, with less than one per mille of the world's population, smaller than 110 other countries". Hal ini mengindikasikan bahwa L.L. Rasmussen juga menyadari bahwa Denmark merupakan negara kecil dengan luas wilayah yang kecil. Hal ini terus berlanjut dan berulang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt. Helle Thorning-Schmidt dalam pidatonya di hadapan parlemen pada 1 Oktober 2013 menyatakan bahwa "Denmark is a small country, But we are also a privileged country that can make a difference." Hal ini menunjukkan bahwa Helle Thorning-Schmidt menyadari bahwa Denmark merupakan sebuah negara yang kecil.

Meskipun demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah walaupun Denmark mempersepsikan dirinya sebagai negara kecil, namun di saat yang sama Denmark juga berusaha untuk mempertahankan negaranya dan menyadari bahwa ia memiliki peran dan tanggung jawab yang penting di ranah internasional. Hal ini yang diutarakan oleh L.L. Rasmussen dalam pidatonya di hadapan parlemen tahun 2015. L.L. Rasmussen menyatakan "Denmark is a small country in a large world. We are dependent on what happens beyond our borders. But we must decide for ourselves what kind of country we are". Dalam pidato tersebut L.L. Rasmussen menekankan bahwa meskipun sebagai negara kecil, namun Denmark dapat menentukan secara mandiri seperti apa negara Denmark yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa elit politik mencoba untuk menghilangkan kesan negatif yang dimiliki oleh negara kecil.

Secara historis, guna menghilangkan kerentanan yang dimiliki sebagai negara kecil, Denmark mengembangkan sistem ekonomi-politik negara kesejahteraan, sebuah sistem yang telah menjadi kebanggaan bagi Denmark. Kekalahan dari Jerman menciptakan pemahaman bahwa kurangnya kemampuan untuk membela negara secara militer harus dapat diganti dengan kemauan untuk membentuk sebuah tipe masyarakat yang dihargai oleh masyarakat di dalamnya melalui sebuah proyek nasional yang bisa dibanggakan dan dikenali oleh masyarakat (Korsgaard 2006, 149). Hal ini sesuai dengan pidato L.L. Rasmussen sebelumnya yang menyatakan bahwa Denmark harus bisa menentukan secara mandiri seperti apa negara Denmark yang diinginkan. Dengan menganut sistem negara kesejahteraan, memiliki misi nasional untuk bertanggung jawab dan mengambil peran besar dalam perlindungan dan

kesejahteraan masyarakatnya. Sejak menganut sistem ini, beberapa kali masalah internal seperti meningkatnya ketimpangan sosial maupun tingkat pengangguran dapat diselesaikan dan oleh karenanya pada saat itu muncul asumsi bahwa sistem ini harus menjadi dasar sebuah kebijakan di masa depan (Kaspersen 2006, 116). Dalam beberapa dokumen dasar pemerintahan Denmark juga telah disebutkan bahwa Denmark akan bertanggung jawab dan mengambil peran besar dalam perlindungan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pada dokumen pemerintah yang berjudul “New Goals, Government Platform 2005”, dijabarkan bagaimana pemerintah Denmark memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya (Pemerintah Denmark 2005, 4). Menteri Luar Negeri Denmark, Per Stig Moller, dalam pidatonya di China Foreign Affairs University Beijing pada tanggal 11 Mei 2006, juga menyatakan bahwa Denmark dengan tegas percaya pada nilai hakiki masyarakat internasional yang berbasis aturan untuk mencapai kepentingan semua negara dan individu dan menggunakan kebijakan luar negeri yang berdasar pada kepercayaan negara kesejahteraan yang menganut prinsip *open society, democracy, freedom, human rights*, dan *justice* (Moller, 2006) dalam Hvidt & Mouritzen 2007, 137). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Denmark mengacu pada sistem negara kesejahteraan Denmark.

Selain memperbaiki diri secara internal dengan menganut sistem negara kesejahteraan, Denmark juga mencoba untuk membawa tanggung jawab di ranah internasional. Secara historis, kebijakan luar negeri dan pertahanan yang diadopsi oleh Denmark setelah Perang Dunia II diformulasikan untuk keterlibatan aktif Denmark di ranah internasional melalui berbagai aktivitas maupun keikutsertaan di dalam organisasi internasional. Kebijakan ini diadopsi oleh Denmark sebagai cara untuk menjadi “obat” dari dominasi kekuatan yang lebih besar mengingat Denmark merupakan negara kecil (Balslev 1998, 107). Elit politik Denmark selama periode 2005-2015 juga menarasikan tanggung jawab Denmark di ranah internasional sebagai aktor yang secara aktif terlibat di kegiatan maupun organisasi internasional. Pemerintah Denmark mengintensifkan tindakan internasional untuk mendorong kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia melalui PBB dalam bidang hak asasi manusia, serta mengalokasikan lebih banyak dana untuk menciptakan kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bantuan pembangunan. Pada dokumen landasan pemerintahan “Society of Opportunities, Government Platform 2007” ditekankan bagaimana pemerintah Denmark akan terus menempatkan dirinya di ranah internasional sebagai agen yang secara aktif mendorong dunia yang lebih adil dan lebih bebas. Di tahun-tahun kedepan, pemerintah Denmark akan terus memusatkan fokusnya ke dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Denmark akan memperkuat upaya tersebut di UE dan PBB dengan maksud untuk mendorong hak asasi manusia.

Upaya tersebut kemudian dilakukan melalui bantuan pembangunan atau bantuan luar negeri. Dalam pidatonya tahun 2006 di hadapan parlemen Denmark, A.F. Rasmussen menyebutkan bahwa Denmark telah memiliki dasar untuk membuat perbedaan di dunia melalui bantuan pembangunan. Pemerintah Denmark telah menjamin bahwa bantuan pembangunan Denmark akan, di masa depan, jumlahnya tidak kurang dari 0,8 persen dari PNB Denmark. Menteri Luar Negeri Martin Lidegaard, pada pidatonya 10 April 2014 di pertemuan Foreign Policy Society, disebutkan bahwa kebijakan bantuan pembangunan Denmark menjadi instrumen penting bagi Denmark untuk terus aktif di ranah internasional. Hal ini senada dengan Soren Pind, Menteri Kerja Sama Pembangunan, yang menyatakan dalam pidatonya di pertemuan Korps Diplomatik 19 Maret 2010 bahwa kebijakan pembangunan Denmark atau pemberian bantuan luar negeri merupakan bagian sentral dari kebijakan luar negeri dan keamanan Denmark yang aktif di ranah internasional. Bantuan pembangunan menjadi bagian penting dari citra Denmark di luar negeri sebagai bangsa yang terhormat dan baik hati (dalam Hvidt & Mouritzen 2011, 164). Hal berulang kali diutarakan oleh elit politik Denmark termasuk Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt. Pada sambutan tahun baru 2015, Helle Thorning-Schmidt menyatakan:

“We are a small country. But we have a proud history of rendering assistance in countries stricken by war and misery. We assume responsibility. And we can only do so because there are Danes who, each and every one, make a difference.” (Thorning-Schmidt, 2015).

Pidato tersebut menyatakan dengan jelas bahwa memberikan bantuan luar negeri merupakan sejarah yang membanggakan bagi Denmark. pemberian tersebut merupakan sebuah tanggung jawab bagi Denmark, dan merupakan sebuah hal yang dilakukan untuk membuat perbedaan di ranah internasional.

Dari pembahasan sebelumnya, maka telah dijabarkan gagasan-gagasan seperti apa yang menjadi citra diri nasional Denmark sesuai dengan pengalaman masa lalu Denmark dan narasi atau konstruksi elit politik saat ini. Penulis kemudian menggunakan istilah *The Danish Way* dalam menamai citra diri nasional Denmark karena istilah tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark ketika berbicara mengenai segala aktivitas yang dilakukan oleh Denmark. *The Danish Way* kemudian memberikan sebuah orientasi perilaku bagi Denmark dalam melakukan kerja sama, kompetisi maupun konfrontasi dengan negara lain. Lebih lanjut, penulis kemudian akan melakukan perincian terhadap *The Danish Way* guna memahami lebih jauh orientasi perilaku yang dibawa oleh citra diri tersebut seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini. Penulis menggunakan beberapa indikator yang dijabarkan oleh Anne L. Clunan yaitu sistem ekonomi-politik yang sesuai, misi nasional, peran di ranah internasional yang sesuai, rank atau peringkat di ranah internasional, dan sifat dari hubungan internasional.

Tabel 2 Rincian *The Danish Way*

<i>The Danish Way</i>		
<i>Political Purpose</i>	Sistem ekonomi-politik	Negara kesejahteraan
	Misi nasional	Penyediaan kesejahteraan bagi masyarakatnya
<i>International Status</i>	Kedudukan (<i>ranking</i>) internasional	<i>small state</i>
	Peran internasional	menjadi negara yang dapat memberikan perbedaan dengan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai solidaritas, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, hingga kesetaraan
	Sifat hubungan internasional	<i>World embrace</i>: keterbukaan, kerja sama, dan dukungan untuk negara lain guna menciptakan perdamaian dan kebebasan

Kebijakan Bantuan Luar Negeri Denmark kemudian menjadi refleksi dari *The Danish Way* sebagai roadmap dalam menentukan perilaku Denmark. Jika ditilik dari pendekatan yang digunakan oleh DANIDA yaitu *human rights-based approach*, maka hal ini menjadi cerminan dari peran internasional yang ada di *the Danish Way*, Denmark sebagai negara yang dapat memberikan perbedaan dengan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai solidaritas, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan hingga kesetaraan. Misalnya pada prioritas DANIDA di tahun 2009, yaitu penguatan bantuan di daerah Afrika khususnya bagi kaum muda Afrika. Meningkatkan kesetaraan gender serta hak dan kesempatan bagi perempuan, hingga menciptakan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan dan perdamaian melalui lokasi anggaran khusus yang diperuntukkan bagi demokrasi dan hak asasi manusia bernilai DKK 170 juta per tahun. Prioritas tersebut sesuai dengan peran internasional yang diemban oleh *the Danish Way*.

Lebih lanjut, upaya Denmark untuk tetap memberikan bantuan luar negeri di atas target bantuan internasional sebesar 0,7 persen penulis lihat sebagai refleksi dari *the Danish Way* yang menggambarkan kedudukan Denmark di ranah internasional yang kemudian mendefinisikan kepentingan Denmark. Laurent Goetschel (1998, 22) menyatakan bahwa negara kecil berkeinginan untuk meningkatkan pengaruh (kemampuan untuk memengaruhi pihak lain untuk mengikuti kemauannya) dan juga otonomi (kemampuan untuk mencegah pihak lain memengaruhi perilaku diri sendiri) yang dimiliki, atau setidaknya menjaga pengaruh dan otonomi tersebut. Denmark yang merefleksikan citra diri sebagai sebuah negara kecil kemudian mencoba untuk meningkatkan pengaruhnya melalui tingkat bantuan yang selalu berada di atas target bantuan internasional. Negara kecil mencoba untuk “menebus” kelemahan tradisionalnya, seperti ukuran wilayah, tingkat PDB dan jumlah populasi, dengan menekankan *virtues* yang dimiliki (Goetschel 1998, 22). Pada beberapa dekade yang lalu, Denmark yang memiliki sejarah sebagai negara kecil tengah terancam keberadaannya pada periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 akibat adanya perang, hal ini menjadi aspirasi historis bagi elit politik Denmark saat ini untuk menerapkan kebijakan yang dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat, ekonomi, wilayah serta identitas nasional mereka. Setidaknya pada periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Denmark menerapkan kebijakan yang aktif untuk membuat perbedaan di ranah internasional saat ini. Kebijakan tersebut penulis lihat sebagai upaya Denmark untuk memperbesar pengaruh atau setidaknya menjaga otonominya. Dengan aktif sebagai negara pendonor melalui tingkat bantuan yang melebihi target bantuan internasional, Denmark akan meningkatkan atau setidaknya menjaga pengaruh Denmark di ranah internasional. pemerintah Denmark berkeinginan untuk tetap menjadi negara donor paling dermawan dalam memberikan bantuan pembangunan. Pemerintah pada saat bersamaan, memastikan bahwa Denmark tidak akan berada di bawah 0,8 persen terhadap PNB di tahun-tahun mendatang. Selain itu, dalam beberapa pidato dan dokumen landasan pemerintah lainnya, disebutkan dengan jelas bahwa volume pemberian bantuan luar negeri yang mencapai target bantuan internasional menjadi instrumen penting bagi Denmark untuk tetap aktif di ranah internasional. Dalam beberapa dokumen tersebut juga disebutkan tingkat volume bantuan yang mencapai target bantuan internasional tidak hanya sebagai upaya Denmark untuk tetap aktif di ranah internasional namun juga sebagai upaya Denmark untuk mengentaskan kemiskinan karena hal itu merupakan tanggung jawab Denmark sebagai suatu negara.

Kesimpulan

Seperti yang diutarakan oleh Maurizi Carbone, salah satu alasan mengapa suatu negara memberikan bantuan luar negeri adalah adanya motif non-material yang berdasar pada gagasan-gagasan seperti altruisme, kewajiban moral, kemanusiaan hingga identitas. Gagasan-

gagasan seperti itu ternyata dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Pembuat kebijakan menaruh perhatian terhadap gagasan mengenai citra diri nasional yang dimiliki oleh negaranya yang kemudian menjadi batasan-batasan serta arahan bagi pembuat kebijakan. Tulisan ini kemudian menggambarkan hal tersebut, bagaimana citra diri nasional yang dimiliki oleh Denmark dimaknai oleh elit politik yang kemudian menentukan arah kebijakan bantuan luar negeri Denmark. ditemukan pula bahwa elit-elit politik Denmark melakukan konstruksi citra diri nasional yang sesuai dengan sejarah masa lalu Denmark sebagai negara. Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kerja Sama Pembangunan serta partai-partai yang tengah memimpin pemerintahan Denmark kerap menyatakan citra diri nasional Denmark yang terdiri dari sistem ekonomi-politik, misi nasional, kedudukan internasional, serta peran internasional. Citra diri nasional Denmark tersebut dinamakan sebagai *The Danish Way*, dengan sistem ekonomi-politik negara kesejahteraan, dengan misi nasional untuk menyediakan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya, dengan kedudukan sebagai negara kecil di ranah internasional namun bertanggung jawab untuk menjadi negara yang dapat memberikan perbedaan dengan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai solidaritas, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, hingga kesetaraan. Dalam menjalankan peran internasionalnya, Denmark kemudian menggunakan bantuan luar negeri sebagai upaya untuk tetap berperan aktif di ranah internasional seperti yang tertulis di dalam dokumen resmi pemerintahan maupun yang diucapkan dalam pidato-pidato resmi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kerja Sama Pembangunan. Dari temuan tersebut dapat terlihat bahwa elit politik Denmark melihat citra diri nasional tersebut dalam melakukan kebijakan bantuan luar negeri. Tingkat bantuan luar negeri yang sesuai dengan target bantuan internasional menjadi instrumen penting bagi Denmark yang ingin memainkan perannya di ranah internasional. Selain itu, bantuan luar negeri menjadi instrumen bagi Denmark dalam menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut.

Melalui kasus pencapaian target bantuan internasional oleh Denmark selama periode 2005-2015 ini, penulis melihat bahwa citra diri nasional memberikan batasan-batasan, kemungkinan-kemungkinan serta dorongan bagi para pembuat kebijakan untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Meskipun begitu, penulis juga tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam penelitian ini. Penulis beranggapan bahwa kasus ini juga dapat dijelaskan secara terperinci dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda misalnya adanya kepentingan ekonomi di balik tingginya tingkat bantuan luar negeri Denmark. Penulis melihat bahwa ada kemungkinan bahwa bantuan luar negeri diberikan untuk dijadikan sebagai perpanjangan korporasi-korporasi Denmark di negara tujuan. Hal tersebut yang luput dijelaskan melalui penelitian ini. Namun demikian, penulis setuju bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dapat digerakkan oleh citra diri nasional negara bersangkutan.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Balslev, Uffe. 1998. "The Danish Case: International Involvement as the Small State's Remedy for Great Power Dominance." Dalam Laurent Goetschel. *Small States inside and outside the European Union*. New York: Springer, hlm. 107-125.
- Carbone, Maurizi. 2007. *The European Union and International Development*. London: Routledge.
- Clunan, Anne L. 2009. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity and Security Interests*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.

- Elgstrom, Ole. 2000. *Images and Strategies for Autonomy: Explaining Swedish Security Policy Strategies in the 19th Century*. New York: Springer.
- Goestchel, Laurent. 1998. *Small States Inside and Outside the European Union: Interests and Policies*. Boston: Springer.
- Hvidt, Nanna & Hans Mouritzen. 2006. *Danish Foreign Policy Yearbook 2007*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
- _____. 2011. *Danish Foreign Policy Yearbook 2011*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
- Kaspersen, Lars Bo. 2006. "The Formation and Development of the Welfare State." Dalam Campbell, L. John et al., *National Identity and the Varieties of Capitalism*. Kingston: McGill-Queen's University Press, hlm. 99-132.
- Kegley, Charles W & Shannon L. Blanton. 2011. *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Wadsworth.
- Korsgaard, Ove. 2006. "The Danish Way to Establish the Nation in the Hearts of the People." Dalam Campbell, L. John et al., *National Identity and the Varieties of Capitalism*. Kingston: McGill-Queen's University Press, hlm. 133-58.
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.
- Østergård, Uffe. 2012. "Danish National Identity: A Historical Account." Dalam Martine Cardel Gertsen et al. *Global Collaboration: Intercultural Experiences and Learning*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 37-59.
- Sørensen, Anders Ravn. 2015. *Banking on the Nation: How Four Danish Central Bank Governors Used and Reproduced the Logics of National Identity*. New York: Springer.

Artikel dalam Jurnal

- Wicaksana, I.G. Wahyu. "The Constructivist Approach towards Foreign Policy Analysis." *Indonesian Journal of Social Sciences* Vol. 1 / No. 1 (2009).

Situs Web dan Artikel Daring

- Bank Dunia. "Gross national income 2016, Atlas method", <http://databank.worldbank.org/data/download/GNI.pdf> (diakses pada: 13 Oktober 2016)
- Copenhagen Post. "Opposition: Cut Taxes and Development Aid" Copenhagen, 6 September 2013, <http://cphpost.dk/news/politics/opposition-cut-taxes-and-development-aid.html> (diakses pada: 5 November 2016).
- Dewan Uni Eropa. "2660th Council meeting General Affairs and External Relations 8817/05" http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-05-112_en.htm (diakses pada: 10 Oktober 2016).
- _____. "Multiannual Financial Framework 2014-20." http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf (diakses pada: 10 Oktober 2016).
- Kementerian Luar Negeri Denmark. "The Beginning: Goodbye Colonialism" <http://introductiontodanida.um.dk/en/the-danida-brand/history/the-beginning-goodbye-colonialism/> (diakses pada: 8 November 2017).
- _____. "Priority Countries" <http://introductiontodanida.um.dk/en/danida-at-work/danidas-work-at-a-glance/priority-countries/> (diakses pada: 8 November 2017).
- OECD. "Net Official Development Assistance from DAC and Other Donors in 2015", <https://www.oecd.org/dac/stats/ODA-2015-complete-data-tables.pdf> (diakses pada: 13

Oktober 2016).

Dokumen Pemerintah

- Pemerintah Denmark, Kementerian Luar Negeri. 2006. *Commitment to Development: Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance 2007-2011*.
- _____. 2008. *Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance: Overview of the Development Assistance Budget 2009-2013*.
- Pemerintah Denmark, Regeringen. "New Goals, Government Platform 2005," Februari 2005 http://stm.dk/publikationer/UK_reggrund05/New_Goals.pdf (diakses pada: 1 Oktober 2017).
- _____. "Society of Opportunities, Government Platform 2007," November 2007. http://stm.dk/publikationer/UK_Regeringsgrundlag2007/index.htm (diakses pada: 10 Oktober 2017).
- _____. "A Denmark that Stands Together", Oktober 2011, http://www.stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_uk_2011.pdf (diakses pada: 4 Oktober 2017).

Pidato

- Lidegaard, Martin. "A Danish Perspective on the World Today." Kopenhagen, 10 April 2014, <http://um.dk/en/about-us/the-ministers/speeches-and-articles-by-former-ministers/martin-lidegaard-speeches-and-articles/a-danish-perspective-on-the-world-today/> (diakses pada: 10 Oktober 2017).
- Moller, Per Stig. 2006. "Denmark and China in the Globalised World". China Foreign Affairs University, Beijing, 11 Mei 2006. Dalam Nanna Hvidt dan Hans Mouritzen. *Danish Foreign Policy Yearbook 2007*. Kopenhagen: Danish Institute for International Studies.
- Pind, Soren. 2010. "Development Policy." Pidato pertemuan tahunan dengan perwakilan diplomatik, Kopenhagen, 19 Maret 2010. Dalam Nanna Hvidt dan Hans Mouritzen. *Danish Foreign Policy Yearbook 2011*. Kopenhagen: Danish Institute for International Studies.
- Rasmussen, Anders Fogh. 2005. "Pidato Pembukaan Majelis Parlemen NATO." Kopenhagen, 15 November 2005, http://stm.dk/_p_11201.html (diakses pada: 5 Oktober 2017).
- _____. "Making the most Globalisation." Indian Institute of Management, Bangalore, 5 Februari 2008, http://stm.dk/_p_11157.html (diakses pada: 5 Oktober 2017).
- _____. "Pidato pada Parlemen Denmark." The Folketing, Kopenhagen, 3 Oktober 2006, http://stm.dk/_p_11207.html (diakses pada: 10 Oktober 2017).
- Rasmussen, Lars Lokke. "Pidato pada Parlemen Denmark." The Folketing, Kopenhagen, 6 Oktober 2009, http://stm.dk/_p_12957.html (diakses pada: 3 Oktober 2017).
- _____. "Pidato pada Parlemen Denmark" (The Folketing, Kopenhagen, 6 Oktober 2015), http://stm.dk/_p_14252.html (diakses pada: 5 Oktober 2017).
- Thorning-Schmidt, Helle. "Pidato Sambutan Tahun Baru." Kopenhagen, 1 Januari 2013, http://stm.dk/_p_13797.html (diakses pada: 4 Oktober 2017).
- _____. "Pidato Sambutan Tahun Baru." Kopenhagen, 1 Januari 2015, http://www.stm.dk/_p_14105.html (diakses pada: 10 Oktober 2017).